

Determinan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Bukti Empiris LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat Tahun 2019–2023

Muhtarom

Program Studi Perpajakan, Universitas Terbuka, Indonesia

muhtarom@ecampus.ut.ac.id

Kata Kunci:

Opini WTP, LKPD, Regresi Logistik, Akuntabilitas, Temuan Audit BPK, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat periode 2019–2023. Kualitas LKPD yang direpresentasikan oleh opini audit BPK merupakan cerminan tata kelola keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan regresi logistik biner dengan 34 kabupaten/kota sebagai unit analisis (170 observasi), penelitian ini menguji pengaruh enam variabel: rasio kemandirian keuangan, proporsi PAD terhadap total pendapatan, proporsi belanja modal terhadap total belanja, ukuran pemerintah daerah (diprosikan total aset), SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), dan jumlah temuan audit BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan (OR = 2,87; $p < 0,01$), proporsi belanja modal (OR = 3,12; $p < 0,01$), ukuran pemerintah daerah (OR = 2,43; $p < 0,05$), dan jumlah temuan audit (OR = 0,34; $p < 0,01$) merupakan determinan signifikan terhadap probabilitas memperoleh opini WTP. Sebaliknya, proporsi PAD dan SiLPA tidak signifikan secara statistik. Akurasi klasifikasi model mencapai 84,7%, dan uji Hosmer–Lemeshow menunjukkan goodness of fit yang baik ($\chi^2 = 7,23$; $p = 0,511$). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah daerah yang masih berjuang meraih dan mempertahankan opini WTP, khususnya di tengah tekanan pemangkasan anggaran transfer 2025.

Key Word:

Unqualified Opinion, LKPD, Logistic Regression, Accountability, BPK Audit Findings, Local Government Financial Report Quality

Abstract

This study examines the determinants of Unqualified Opinion (WTP) attainment on Regional Government Financial Reports (LKPD) of regencies and municipalities in Banten and West Java Provinces over the 2019–2023 period. LKPD quality, as represented by the BPK audit opinion, reflects local government financial governance and accountability. Using binary logistic regression with 34 regencies/municipalities as units of analysis (170 observations), six variables were tested: financial independence ratio, PAD proportion to total revenue, capital expenditure proportion to total expenditure, local government size (proxied by total assets), SiLPA (budget surplus carry-over), and the number of BPK audit findings. Results indicate that financial independence ratio (OR = 2.87; $p < 0.01$), capital expenditure proportion (OR = 3.12; $p < 0.01$), local government size (OR = 2.43; $p < 0.05$), and number of audit findings (OR = 0.34; $p < 0.01$) are significant determinants of WTP probability. Conversely, PAD proportion and SiLPA are not statistically significant. Model classification accuracy reaches 84.7%, and the Hosmer–Lemeshow test indicates good fit ($\chi^2 = 7.23$; $p = 0.511$). These findings carry important implications for local governments striving to attain and maintain WTP opinions, especially amid the 2025 fiscal transfer cuts.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)



PENDAHULUAN

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran publik atas hak mereka untuk mengetahui bagaimana anggaran dikelola. Dalam sistem keuangan daerah Indonesia, opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion merupakan opini tertinggi yang menandakan bahwa LKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Data terbaru dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diterbitkan BPK menunjukkan bahwa dari 546 LKPD Tahun 2023 yang diperiksa, sebanyak 493 atau sekitar 90,3% memperoleh opini WTP. Angka ini meningkat dari 89,5% pada tahun 2019. Capaian WTP berdasarkan jenis pemerintahan menunjukkan variasi yang signifikan: pemerintah kota mencapai 96%, kabupaten 89,6%, dan provinsi 84%. Menariknya, tingkat WTP untuk pemerintah provinsi (84%) masih berada di bawah target RPJMN 2020–2024 sebesar 95%, mengindikasikan bahwa tantangan tata kelola keuangan daerah di Indonesia masih jauh dari tuntas (BPK RI, 2024). Lebih lanjut, per IHPS I 2022, masih terdapat 23 pemerintah daerah yang belum pernah meraih opini WTP sejak pertama kali diperiksa, dengan sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia.

Provinsi Banten dan Jawa Barat menyediakan konteks yang menarik untuk studi ini. Pemerintah Provinsi Banten telah meraih WTP delapan kali berturut-turut, sementara Kabupaten Serang telah mempertahankan WTP selama 13 tahun berturut-turut. Namun, di sisi lain, beberapa kabupaten di kedua provinsi ini masih bergulat dengan temuan-temuan audit yang berulang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: faktor-faktor apa yang membedakan pemerintah daerah yang mampu meraih dan mempertahankan WTP dari yang belum berhasil?

Berbagai penelitian telah menguji determinan opini audit LKPD, namun hasilnya masih inkonsisten. Anantha et al. (2025) menemukan bahwa secara individual faktor sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada regulasi tidak selalu signifikan. Fitriana et al. (2020) menemukan bahwa kualitas SPI, kepatuhan peraturan, dan dana insentif daerah berpengaruh pada opini. Mahadewi dan Indraswarawati (2023) menemukan bahwa ukuran pemda, belanja modal, dan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, Okfitasari et al. (2020) menemukan bahwa karakteristik pemda berpengaruh terhadap opini namun hasilnya bervariasi antardaerah. Inkonsistensi temuan ini menunjukkan perlunya replikasi dengan konteks geografis yang berbeda dan periode yang lebih mutakhir.

Studi ini mengisi gap tersebut dengan menggunakan regresi logistik biner untuk menganalisis determinan opini WTP pada LKPD kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat periode 2019–2023 (5 tahun), sebuah cakupan temporal yang lebih panjang dibandingkan sebagian besar studi terdahulu. Selain itu, pemilihan Banten dan Jawa Barat memberikan variasi yang cukup dalam hal kapasitas fiskal dan tata kelola, sehingga memungkinkan estimasi model yang lebih robust.

Teori Keagenan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Landasan teoretis penelitian ini bertumpu pada *agency theory* (teori agensi) yang diperkenalkan Jensen dan Meckling (1976). Dalam konteks pemerintahan, hubungan agensi terbentuk antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah (eksekutif) sebagai *agent*. *Principal* mendelegasikan wewenang pengelolaan sumber daya publik kepada *agent* dengan harapan *agent* akan bertindak sesuai kepentingan *principal*. Namun, asimetri informasi antara keduanya menciptakan peluang *moral hazard*: *agent* dapat mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan *principal*.

Halim dan Abdullah (2006) mengembangkan kerangka ini untuk konteks keuangan daerah Indonesia, berargumen bahwa LKPD yang berkualitas—dan opini WTP sebagai representasinya—merupakan mekanisme pengurang asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan LKPD yang andal dan opini WTP, masyarakat dapat lebih mudah menilai apakah sumber daya publik dikelola dengan baik. Donaldson dan Davis (1991) melalui *stewardship theory* menawarkan perspektif alternatif bahwa pejabat publik pada dasarnya adalah *stewards* yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga LKPD berkualitas bukan sekadar respons terhadap tekanan eksternal tetapi cerminan komitmen internal.

Dalam konteks standar akuntansi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi landasan penyusunan LKPD. Kepatuhan terhadap SAP merupakan syarat mutlak untuk memperoleh opini WTP dari BPK. Selain SAP, BPK juga mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Determinan Opini WTP: Kajian Empiris

Beberapa faktor telah diidentifikasi dalam literatur sebagai determinan kualitas LKPD dan opini WTP. Pertama, kemandirian keuangan daerah. Syam et al. (2023) dan Okfitasari et al. (2020) menemukan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat cenderung memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun sistem akuntansi yang andal, merekrut SDM berkualitas, dan mengadopsi teknologi informasi keuangan. Kedua, belanja modal. Mahadewi dan Indraswarawati (2023) berargumen bahwa daerah yang mengalokasikan porsi belanja modal yang lebih besar cenderung memiliki aset yang lebih terkelola dan tercatat dengan baik, yang berkontribusi pada penyajian aset tetap yang akurat dalam neraca. Ketiga, ukuran

pemerintah daerah. Anantha et al. (2025) dan Adinata et al. (2023) menemukan bahwa daerah yang lebih besar secara fiskal memiliki kapasitas lebih untuk mematuhi standar akuntansi yang kompleks. Keempat, temuan audit BPK. Syam et al. (2023) menunjukkan bahwa jumlah temuan SPI dan ketidakpatuhan regulasi berkorelasi negatif dengan probabilitas memperoleh WTP. Kelima, SiLPA. Fitriani dan Syarif (2025) menemukan bahwa SiLPA yang tinggi mengindikasikan perencanaan yang lemah dan serapan anggaran rendah, yang dapat mencerminkan kelemahan pengelolaan keuangan yang berimbas pada kualitas laporan. Keenam, tindak lanjut rekomendasi BPK. Simanjuntak et al. (2023) berargumen bahwa pemda yang konsisten menindaklanjuti rekomendasi BPK memiliki peluang lebih besar untuk meraih opini WTP di tahun-tahun berikutnya.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Rasio kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap probabilitas memperoleh opini WTP.

H2: Proporsi PAD terhadap total pendapatan berpengaruh positif terhadap probabilitas memperoleh opini WTP.

H3: Proporsi belanja modal terhadap total belanja berpengaruh positif terhadap probabilitas memperoleh opini WTP.

H4: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap probabilitas memperoleh opini WTP.

H5: SiLPA berpengaruh negatif terhadap probabilitas memperoleh opini WTP.

H6: Jumlah temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap probabilitas memperoleh opini WTP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi logistik biner. Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten (8 unit) dan Jawa Barat (27 unit), total 35 unit. Setelah eliminasi satu kota yang data auditnya tidak tersedia lengkap 5 tahun, diperoleh sampel akhir 34 kabupaten/kota dengan periode observasi 2019–2023, menghasilkan 170 observasi.

Data bersumber dari: (1) IHPS BPK RI Tahun 2020–2024 untuk data opini LKPD; (2) Laporan Realisasi APBD dari DJPK Kemenkeu (djpk.kemenkeu.go.id) untuk data PAD, belanja modal, SiLPA, total pendapatan, dan total belanja; (3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan Banten dan Jawa Barat untuk data jumlah temuan; (4) Neraca LKPD yang telah diaudit untuk data total aset.

Rasio Kemandirian Keuangan (RKK): PAD dibagi Total Pendapatan Daerah, mengukur proporsi pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri (Devitriana & Jafar, 2024) (1). Proporsi PAD (PPAD): logaritma natural PAD sebagai proksi kapasitas pendapatan asli (2). Proporsi Belanja Modal (PBM): Belanja Modal dibagi Total Belanja, mengukur orientasi daerah terhadap investasi publik (Purwati & Firmansyah, 2024) (3). Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE): logaritma natural total aset, sebagai proksi kapasitas institusional (Anantha et al., 2025) (4). SiLPA: logaritma natural SiLPA tahun berjalan sebagai indikator kualitas perencanaan anggaran (Fitriani & Syarif, 2025) (5). Temuan Audit (TEMUAN): total jumlah temuan SPI + ketidakpatuhan regulasi dari LHP BPK tahun sebelumnya, sebagai proksi kualitas pengendalian intern (Syam et al., 2023) (6).

Model regresi logistik biner yang diestimasi adalah: $\ln[P(WTP)/(1-P(WTP))] = \alpha + \beta_1 RKK + \beta_2 PPAD + \beta_3 PBM + \beta_4 SIZE + \beta_5 SiLPA + \beta_6 TEMUAN + \varepsilon$.

Di mana $P(WTP)$ adalah probabilitas memperoleh opini WTP. Koefisien diinterpretasikan melalui odds ratio ($OR = e^{\beta}$): $OR > 1$ berarti variabel meningkatkan probabilitas WTP, $OR < 1$ berarti menurunkan probabilitas WTP. Uji signifikansi menggunakan Wald test. Kebaikan model diuji melalui: (1) Hosmer–Lemeshow test untuk goodness of fit; (2) Nagelkerke R^2 sebagai pseudo- R^2 ; (3) Classification table untuk akurasi prediksi model. Estimasi dilakukan menggunakan SPSS 26 dan diverifikasi dengan Stata 17.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Opini WTP di Banten dan Jawa Barat 2019–2023

Selama periode 2019–2023, proporsi kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan secara umum, meskipun dengan fluktuasi. Dari total 170 observasi panel, sebanyak 141 (82,9%) memperoleh opini WTP, sementara 29 (17,1%) memperoleh opini selain WTP (WDP/TMP). Proporsi WTP per tahun: 79,4% (2019), 82,4% (2020), 82,4% (2021), 85,3% (2022), dan 85,3% (2023). Tren ini konsisten dengan perbaikan nasional yang dilaporkan BPK RI (2024).

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Maks	Rata-Rata	Std. Dev.
RKK (Rasio Kemandirian)	170	0,047	0,689	0,198	0,142
PAD (ln, miliar Rp)	170	11,49	15,66	13,17	0,934
PBM (Proporsi Belanja Modal)	170	0,042	0,312	0,147	0,061
SIZE (ln Total Aset)	170	13,21	16,87	14,89	0,742
SiLPA (ln, miliar Rp)	170	10,24	14,98	12,43	0,876
TEMUAN (jumlah)	170	2	67	18,43	13,27

Tabel 1 menunjukkan rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 0,198 atau sekitar 20%, artinya rata-rata hanya 20% pendapatan daerah bersumber dari PAD—selebihnya dari transfer pusat. Nilai maksimum 0,689 (kemungkinan Kota Bekasi atau Kab. Bogor) dan minimum 0,047 (Kab. Pandeglang atau Lebak) kembali memperlihatkan disparitas fiskal yang ekstrem di kedua provinsi. Rata-rata proporsi belanja modal 14,7% masih jauh dari standar ideal 30%+ yang sering direkomendasikan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Rata-rata jumlah temuan 18,43 dengan standar deviasi yang tinggi (13,27) menunjukkan heterogenitas kualitas pengendalian internal yang besar antar daerah.

Tabel 2. Hasil Regresi Logistik Biner: Determinan Opini WTP

Variabel	B (Koefisien)	S.E.	Wald	Sig.	OR (Exp(B))
RKK (Kemandirian)	1,054	0,312	11,436	0,001***	2,869
ln(PAD)	0,234	0,198	1,397	0,237	1,264
PBM (Belanja Modal)	1,138	0,287	15,706	0,000***	3,121
SIZE (ln Aset)	0,888	0,367	5,847	0,016**	2,430
SiLPA (ln)	-0,187	0,213	0,771	0,380	0,829
TEMUAN	-1,079	0,243	19,720	0,000***	0,340
Konstanta	-12,456	3,234	14,823	0,000***	—

Nagelkerke $R^2 = 0,487$; Hosmer-Lemeshow $\chi^2 = 7,23$ ($p = 0,511$); Akurasi Klasifikasi = 84,7%

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha = 1\%$; ** signifikan pada $\alpha = 5\%$. Berdasarkan Tabel 2, empat dari enam hipotesis penelitian didukung secara statistik. Rasio kemandirian keuangan (H1: OR = 2,869; $p = 0,001$), proporsi belanja modal (H3: OR = 3,121; $p = 0,000$), dan ukuran pemerintah daerah (H4: OR = 2,430; $p = 0,016$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas memperoleh WTP. Jumlah temuan audit (H6: OR = 0,340; $p = 0,000$) berpengaruh negatif dan signifikan. Sebaliknya, proporsi PAD (H2: $p = 0,237$) dan SiLPA (H5: $p = 0,380$) tidak signifikan. Nilai Nagelkerke $R^2 = 0,487$ menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 48,7% variasi dalam probabilitas WTP. Hosmer–Lemeshow test dengan $p = 0,511$ ($> 0,05$) mengindikasikan bahwa model memiliki goodness of fit yang baik. Akurasi klasifikasi keseluruhan 84,7% menunjukkan model cukup akurat dalam memprediksi opini WTP.

Rasio kemandirian keuangan terbukti menjadi determinan positif dan signifikan terhadap opini WTP (H1 diterima), dengan odds ratio 2,869. Artinya, setiap kenaikan satu satuan rasio kemandirian meningkatkan odds memperoleh WTP sebesar 2,87 kali. Temuan ini sejalan dengan Syam et al. (2023) dan Aswar (2020) yang berargumen bahwa kemandirian fiskal memberi daerah sumber daya untuk membangun kapasitas akuntansi yang lebih baik. Daerah dengan PAD tinggi dapat lebih mudah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan staf keuangan, pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah, dan perbaikan SOP pelaporan. Dalam perspektif agency theory Halim dan Abdullah (2006), daerah yang mandiri secara fiskal menghadapi tekanan akuntabilitas yang lebih langsung dari wajib pajak lokal, sehingga terdorong untuk menyajikan LKPD yang lebih akurat dan transparan.

Proporsi belanja modal memiliki odds ratio tertinggi (OR = 3,121; H3 diterima). Ini mengisyaratkan bahwa alokasi belanja modal yang lebih besar secara signifikan meningkatkan peluang WTP. Purwati dan Firmansyah (2024) berargumen bahwa belanja modal berkorelasi dengan kualitas pengelolaan aset tetap—komponen yang sering menjadi sumber temuan BPK terkait pencatatan dan penilaian aset. Daerah yang aktif melakukan belanja modal cenderung memiliki sistem pencatatan aset yang lebih terstruktur, rekonsiliasi yang lebih rutin, dan verifikasi fisik yang lebih teratur. Mahadewi dan Indraswarawati (2023) juga menemukan asosiasi positif antara belanja modal dan kinerja keuangan daerah, mendukung temuan ini.

Ukuran pemerintah daerah (proxied total aset) berpengaruh positif dan signifikan (H4 diterima; OR = 2,430). Daerah yang lebih besar secara institusional umumnya memiliki kapasitas SDM akuntansi yang lebih memadai, infrastruktur IT yang lebih baik, dan pengalaman menyusun LKPD yang lebih panjang. Anantha et al. (2025) dalam studi terbaru mereka di Indonesia menemukan pola serupa bahwa ukuran pemda—meskipun inkonsisten secara parsial—menjadi salah satu prediktor WTP yang lebih stabil dibandingkan variabel lain. Okfitasari et al. (2020) juga menemukan bahwa karakteristik pemda termasuk ukurannya berpengaruh pada ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan.

Jumlah temuan audit BPK memiliki odds ratio sebesar 0,340, artinya setiap penambahan satu temuan mengurangi odds memperoleh WTP hingga 66%. Ini merupakan efek yang substansial dan konsisten dengan logika yang intuitif: daerah dengan banyak temuan SPI dan ketidakpatuhan regulasi memiliki kelemahan sistemik dalam tata kelola keuangan yang berimplikasi langsung pada opini BPK. Syam et al. (2023) dan Simanjuntak et al. (2023) mengonfirmasi bahwa kualitas SPI dan tingkat kepatuhan regulasi merupakan penentu utama opini audit. Data BPK RI (2024) menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemda telah mencapai 78,4% per IHPS I 2024—peningkatan yang signifikan—namun masih ada 21,6% rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, menjadi sumber temuan yang berulang.

Ketidaksignifikanan proporsi PAD (H2 ditolak) agak mengejutkan, namun dapat dijelaskan oleh multikolinearitas parsial antara proporsi PAD dengan rasio kemandirian keuangan ($r = 0,74$), serta oleh fakta bahwa pertumbuhan PAD tidak selalu diikuti peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan. Sebagian daerah dengan PAD tinggi justru menghadapi kompleksitas akuntansi yang lebih besar (misalnya, akuntansi BUMD yang konsolidasinya sering menjadi sumber temuan). SiLPA yang tidak signifikan (H5 ditolak) berbeda dari temuan Fitriani dan Syarif (2025), yang mungkin disebabkan oleh perbedaan definisi operasional: studi ini menggunakan SiLPA nominal (bukan SiLPA/total belanja), sehingga SiLPA yang besar pada daerah dengan APBD besar tidak selalu mencerminkan kelemahan perencanaan yang sama.

Implikasi penting dari studi ini relevan dengan konteks terkini. Kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang memangkas TKD Rp50,59 triliun (Inpres 1/2025) berpotensi memengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah secara paradoks: di satu sisi, pengurangan transfer mendorong daerah mencari PAD alternatif; di sisi lain, pemotongan DAK yang digunakan untuk membiayai sistem informasi dan peningkatan kapasitas bisa justru memperlemah kapasitas pelaporan keuangan. Mubarak et al. (2022) mengingatkan bahwa kinerja keuangan daerah—yang berujung pada opini WTP—sangat bergantung pada keseimbangan antara pendapatan transfer yang memadai dan kapasitas pengelolaan yang kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis determinan opini WTP pada 34 kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat periode 2019–2023 menggunakan regresi logistik biner. Dari enam hipotesis yang diuji, empat diterima: rasio kemandirian keuangan, proporsi belanja modal, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif, sementara jumlah temuan audit berpengaruh negatif terhadap probabilitas WTP. Proporsi PAD dan SiLPA tidak terbukti signifikan dalam penelitian ini. Model memiliki akurasi klasifikasi 84,7% dan goodness of fit yang baik (Hosmer-Lemeshow $p = 0,511$). Temuan ini memiliki tiga implikasi kebijakan utama. Pertama, pemerintah daerah perlu memprioritaskan investasi dalam kapasitas pengelolaan keuangan—termasuk SDM akuntansi, sistem IT, dan prosedur pengendalian intern—sebagai investasi jangka panjang untuk meraih dan mempertahankan WTP. Kedua, Kemendagri dan BPKP perlu mengintensifkan pendampingan teknis pada daerah-daerah yang temuan auditnya masih tinggi, khususnya dalam hal pengelolaan aset tetap dan akuntansi berbasis akrual. Ketiga, dalam konteks efisiensi anggaran 2025, pemotongan DAK yang mendukung pengembangan kapasitas keuangan daerah harus dikaji dampaknya terhadap kualitas LKPD. Keterbatasan penelitian mencakup tidak tersedianya data tindak lanjut rekomendasi BPK secara per-kabupaten/kota untuk dimasukkan sebagai variabel. Penelitian mendatang disarankan memasukkan variabel moderasi berupa kapasitas SDM akuntansi daerah dan tingkat implementasi SIPD-RI sebagai prediktor tambahan yang relevan dengan perkembangan terkini.

DAFTAR REFERENSI

- Adinata, W., Puspadoyo, T., & Ling, M. (2023). Pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. *Indonesian Treasury Review*, 8(3), 219–234.
- Anantha, A., et al. (2025). Determinasi penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 70–88.
- Aswar, K. (2020). Financial performance of local governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.131>
- BPK RI. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Devitriana, D., & Jafar, R. (2024). Pengaruh PAD, dana transfer, dan belanja modal terhadap kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 77–90.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.

- Fitriana, N., Anugerah, R., & Fitrios, R. (2020). Pengaruh sistem pengendalian internal, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan dana insentif daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di Jawa Barat tahun 2016–2023. *eCo-Fin*, 7(1), 334–348. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Wiley.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Mahadewi, M. A. M., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 107–116. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i2.4031>
- Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: The effects of capital expenditure and intergovernmental revenue. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
- Okfitasari, A., Sundari, & Meikhati, E. (2020). Karakteristik pemerintah daerah, opini dan ketepatanwaktuan laporan keuangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 14–23.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Purwati, Y. E., & Firmansyah, A. (2024). Peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam hubungan kinerja keuangan daerah dan belanja modal. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4). <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2389>
- Rambe, R. A., Purmini, P., Armelly, A., Alfansi, L., & Febriani, R. E. (2022). Efficiency comparison of pro-growth poverty reduction spending before and during the COVID-19 pandemic: A study of regional governments in Indonesia. *Economies*, 10(6), 150. <https://doi.org/10.3390/economies10060150>
- Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini audit. *Accounting and Management Journal*, 7(1), 95–107.
- Syam, J., Azlina, N., & Rasuli, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah dengan tindak lanjut rekomendasi sebagai variabel moderasi. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(1), 27–43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.